

BAB III

KEBIJAKAN PERS MASA PEMERINTAHAN JEPANG DAN KEMUNCULAN MAJALAH *DJAWA BAROE*

3.1 Kebijakan Pers Indonesia Masa Pemerintahan Jepang

Pers memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran propaganda Jepang. Bagi pihak Jepang, media massa merupakan sarana yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menyebarluaskan propaganda secara luas dan terus menerus. Jepang menerapkan sistem Otoritarian, yaitu suatu sistem di mana media massa berfungsi sebagai alat pemerintah untuk menyampaikan informasi yang mencerminkan kehendak dan pandangan penguasa. Dalam sistem ini, media diharapkan menyampaikan apa yang dianggap penting oleh pemerintah, mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat, serta membentuk opini publik sesuai arah yang ditentukan oleh penguasa⁶¹.

Pada masa berlangsungnya perang Asia Timur Raya, surat kabar mulai dipandang sebagai sarana yang praktis untuk kepentingan propaganda. Media ini dimanfaatkan untuk memperoleh legitimasi dan keuntungan dalam upaya memenangkan perang tersebut. Pemerintah Jepang menyadari pentingnya penguasaan informasi, sehingga mereka mulai merancang peraturan yang ketat mengenai peredaran surat kabar.

Ketentuan tersebut dituangkan dalam Dokumen Administrasi Militer Jepang No. 18, regulasi tersebut kemudian menjadi bagian dari Kebijakan Departemen

⁶¹ Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila, Edisi 2 Cetakan Pertama*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1988, hlm. 15.

Propaganda yang mencakup beberapa prinsip pokok terkait sistem penerangan dan pengelolaan pers di wilayah Jawa⁶².

Pertama, pers diharapkan dapat menerbitkan surat kabar yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk membentuk satu surat kabar utama yang dapat beroperasi di wilayah kekuasaan pemerintah militer Angkatan Darat ke 16 Tentara Kekaisaran Jepang. Untuk merealisasikan rancangan tersebut, pemerintah membentuk *Djawa Shinbunkai*⁶³.

Kedua, upaya yang dilakukan adalah membentuk surat kabar lokal menggunakan bahasa Indonesia, dengan didasari semangat bangsa di seluruh Pulau Jawa. Gagasan tersebut diawali dengan penerbitan surat kabar *Asia Raya*, yang menjadi kunci dalam pengaturan pers, menjaga kesinambungan, serta memainkan peran penting dalam dunia pers⁶⁴. Dengan kata lain, diperlukan kesetaraan pandangan antara surat kabar lokal dan surat kabar yang dikelola oleh pihak Jepang agar mampu membangun dukungan dari masyarakat, serta memperkuat kedudukan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Ketiga, seluruh bentuk motif untuk mencari keuntungan dari penerbitan surat kabar harus dihapuskan sepenuhnya. Pemerintah Jepang meyakini bahwa pendapat umum dapat mempengaruhi arah serta hasil dari peperangan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas apabila sewaktu-waktu terjadi alih

⁶² Harry J. Benda, *Japanese Military Administration in Indonesia*, New Haven: Yale University, 1965, p. 69.

⁶³ *Djawa Shinbunkai*, merupakan badan pers surat kabar yang bertugas untuk mengatur, mengawasi penerbitan, menetapkan harga langganan, serta mengarahkan berita apa saja yang harus dimuat dalam surat kabar di Jawa. Diketahui oleh Suzuki Bunshiro, sementara ketua mudanya yaitu Soekardjo Wirjopranoto. Lihat: Nino Oktorino, *op.cit.*, hlm. 25.

⁶⁴ *Ibid.*

kepemilikan mengenai surat kabar kepada pihak sipil, baik dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi, atau pun untuk kepentingan pribadi. Fungsi utama pengalihan surat kabar yaitu untuk mendukung proses perang Asia Timur Raya. segala bentuk pembayaran dari masyarakat hanya diperbolehkan untuk menunjang operasional surat kabar tersebut⁶⁵.

Pola tersebut sejalan dengan peran pers di Jepang yang difungsikan sebagai sarana propaganda, yakni menyuarakan kepentingan serta kebutuhan pemerintah tanpa memberikan ruang yang luas bagi kritik atau pandangan alternatif dari masyarakat. Walaupun proses pembuatan materi propaganda telah berada di bawah pengawasan ketat pemerintah militer Jepang, penyiarannya pun tidak luput dari pengendalian. Pemerintah memberlakukan sistem sensor yang diatur secara hukum untuk memastikan isi siaran tetap sesuai dengan kepentingan mereka. Pemerintah Jepang menerapkan pengawasan ketat terhadap seluruh media pers di Indonesia. Setiap bahan cetakan, termasuk tulisan maupun berita, harus melalui filterisasi berita oleh petugas sensor. Proses ini diakhiri dengan pemberian paraf sebagai tanda persetujuan, yang memperoleh syarat wajib memiliki perizinan.

Salah satu surat kabar yang lolos sensor dan diberi izin penerbitan oleh layanan propaganda adalah surat kabar *Asia Raya*, terbit di Jakarta pada 29 April

⁶⁵ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998, hlm. 146.

1942 yang dipimpin oleh Sukardjo Wirjopranoto⁶⁶. Surat kabar ini menjadi surat kabar resmi di bawah Layanan Propaganda dari Administrasi Militer Jepang⁶⁷.

Untuk mengatur aktivitas pers di wilayah Jawa, pemerintah Jepang membentuk *Djawa Shinbunkai*. Berdasarkan *Osamu Seirei* 51, badan ini berfungsi sebagai induk organisasi yang mengatur seluruh persuratkabaran di Jawa, dipimpin oleh Suzuki Bunshiro⁶⁸ yang sekaligus menjabat sebagai kepala redaksi *Djawa Shinbun*⁶⁹. Seluruh bentuk dan pola pemberitaan pers di Indonesia telah diseragamkan oleh pihak pemerintah Jepang pada tahun 1943⁷⁰.

Kebijakan pemerintah Jepang dalam mengatur kehidupan pers selama masa pendudukan memang membatasi fungsi pers sebagai sarana informasi bagi masyarakat luas. Namun, kondisi tersebut justru memberikan kontribusi penting terhadap perjuangan kemerdekaan dan perjuangan pers nasional setelah Indonesia merdeka. Salah satu dampak positifnya adalah pelarangan penggunaan bahasa Belanda yang mendorong penyebaran bahasa Indonesia secara merata ke seluruh wilayah Nusantara. Selain itu, masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan untuk belajar mengelola media massa, serta dipercaya untuk memegang berbagai jabatan penting dalam struktur pers, sesuatu yang sebelumnya sangat terbatas pada masa penjajahan Belanda.

⁶⁶ Tokoh nasionalis Indonesia yang aktif dalam sejumlah organisasi pergerakan sejak jaman kolonial Belanda. Pada masa Jepang, bekerja sebagai kepala editor surat kabar *Asia Raya*. kemudian diangkat menjadi anggota BPUPKI. Lihat: Nino Oktorino, *op.cit.*, hlm. 109.

⁶⁷ Izaak Johannes Bruggmans, *Nederlandsch Indie Onder Japanse Bezetting 1942-1945*, Franeker: Uitgeverij T. Wever B. V, 1960, p. 200.

⁶⁸ *Djawa Baroe* No. 4 2603, *Kedjadian-kedjadian jang Terpenting Sampai Hari Ini*, 15 Februari 1943, hlm. 22.

⁶⁹ *Djawa Shinbun*, adalah surat kabar berbahasa Jepang yang diterbitkan oleh pemerintah Jepang pada 8 Desember 1942 di Jakarta. Menjadi salah satu sumber utama pemberitaan surat kabar di Jawa. Lihat: Nino Oktorino, *op.cit.*, hlm. 25.

⁷⁰ Tribuana Said., *op.cit.*, hlm. 48.

3.2 Kemunculan Majalah *Djawa Baroe*

Majalah *Djawa Baroe* adalah salah satu majalah yang diterbitkan oleh pemerintah Jepang di Indonesia. Majalah ini mulai terbit pada tanggal 1 Januari 1943, dan edisi terakhirnya terbit pada tanggal 15 Agustus 1945. Majalah ini diterbitkan di Pulau Jawa dengan frekuensi terbit dua kali dalam sebulan, yaitu setiap tanggal 1 dan 15. Majalah *Djawa Baroe* diterbitkan oleh *Djawa Shinbun Sha*⁷¹, yang beralamat di Molenvliet No. 8, Djakarta, dicetak oleh Z. Kasidjima, dan memiliki oplah 20.000 eksemplar⁷².

Selama masa terbitnya antara tahun 1943 hingga 1945, majalah *Djawa Baroe* mengalami empat kali pergantian pimpinan penerbit. Pada awal penerbitannya, majalah ini dipimpin oleh B. Soezoeeki⁷³, namun kepemimpinannya hanya berlangsung sementara. Pada 1 Juli 1943, posisinya digantikan oleh H. Nomoera⁷⁴, yang kemudian menjabat selama kurang lebih satu tahun. Pada Juli 1944, kepemimpinan berpindah ke tangan S. Higashiguschi⁷⁵, sebelum akhirnya digantikan oleh T. Masudo⁷⁶ pada 1 Agustus 1945. Pergantian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penyesuaian strategi propaganda Jepang. Meskipun terjadi beberapa kali pergantian pimpinan, isi dan tampilan dari majalah *Djawa Baroe* tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan⁷⁷.

⁷¹ ジャワ新聞社 (*Djawa Shinbun Sha*) merupakan perusahaan penerbitan surat kabar di Pulau Jawa yang dinaungi oleh *Djawa Shinbun*. Lihat: Nino Oktorino, *loc.cit.*

⁷² Nino Oktorino, *op.cit.*, hlm. 22.

⁷³ *Djawa Baroe* No. 1-12 2603, 1 Januari-15 Juni 1943.

⁷⁴ *Djawa Baroe* No. 13 2603-12 2604, 15 Juni 1943-15 Juni 1944.

⁷⁵ *Djawa Baroe* No. 13 2604, 1 Juli 1944.

⁷⁶ *Djawa Baroe* No. 15 2605, 1 Agustus 1945.

⁷⁷ Nino Oktorino, *op.cit.*, hlm. 22-23.

Selain mengalami empat kali pergantian pimpinan penerbit, majalah *Djawa Baroe* juga sempat mengalami perubahan dalam hal harga jual. Pada awalnya harga per eksemplar majalah ini ditetapkan sebesar *f* 0.15 (lima belas sen gulden), sedangkan biaya berlangganan per tiga bulan adalah *f* 0.75. Harga yang cukup terjangkau ini sengaja ditetapkan oleh pemerintah Jepang dengan tujuan agar majalah *Djawa Baroe* dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui strategi ini, Jepang berharap pesan-pesan propaganda yang disampaikan lewat majalah dapat diterima luas dan mencapai sasarannya. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap majalah ini, pemerintah Jepang kemudian menaikkan harga per eksemplarnya menjadi *f* 0.20. Selain itu, mulai tanggal 1 April 1943, jumlah halaman setiap edisinya ditambah dari semula 28 menjadi 36 halaman⁷⁸.

Perubahan juga terjadi pada biaya langganan majalah ini. Sebelumnya, tarif langganan per tiga bulan ditetapkan sebesar *f* 0.75. Namun, setelah jumlah halaman ditambah dan harga per eksemplar mengalami penyesuaian, biaya langganan per tiga bulan naik menjadi *f* 1.20⁷⁹. Setelah mengalami perubahan harga dan jumlah halaman, konten dari majalah *Djawa Baroe* semakin menarik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah ilustrasi bergambar serta penambahan berita-berita penting yang relevan dengan peristiwa pada bulan terbit, khususnya mengenai perkembangan Jepang dalam perang yang sedang berlangsung.

Di samping itu, disertakan pula materi pembelajaran bahasa Jepang, seperti cara membaca huruf *Katana* dan *Hiragana*, serta latihan percakapan sehari-hari

⁷⁸ *Djawa Baroe* No. 5 2603, *Berita Redaksi*, 1 Maret 1943, hlm. 31.

⁷⁹ *Djawa Baroe* No. 9 2603, *Warta Administrasi*, 1 Mei 1943, hlm. 4.

yang dilengkapi dengan panduan pelafalan kata per kata di bagian akhir halaman. Pada edisi tertentu juga menyisipkan lagu-lagu berbahasa Jepang yang dituliskan dalam huruf *Katakana*, lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di bawahnya.

Majalah *Djawa Baroe* merupakan salah satu media penting pada masa itu, karena memuat beragam informasi dan berita dari berbagai bidang, seperti pendidikan, politik, pemerintahan, pertanian, ekonomi, kesenian, olahraga, industri, dan iklan. Selain itu, majalah ini juga menyajikan rubrik kesusastaan meliputi puisi, cerpen, sinopsis film, serta naskah sandiwara. Semua narasi tersebut disajikan dalam bentuk tulisan atau gambar.

Sebagai salah satu media pers yang memperoleh izin terbit di Indonesia pada masa pendudukan Jepang, majalah *Djawa Baroe* memiliki peran yang signifikan dalam mendukung penyebaran propaganda. Tindakan tersebut disampaikan melalui berbagai pemberitaan yang menggambarkan segala bentuk aktivitas Jepang di Indonesia. Berita-berita tersebut ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Indonesia yang menunjukkan bahwa sasaran pembacanya tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga warga Jepang yang menetap di Indonesia serta kalangan terpelajar yang menjadi pembaca setia majalah maupun surat kabar.

Hal tersebut sejalan dengan cita-cita yang dikemukakan oleh majalah *Djawa Baroe* pada halaman pertama edisi perdana yang terbit pada tanggal 1 Januari 1943, yaitu:

Tjita² „Djawa Baroe”

- 1) Madjallah „**Djawa Baroe**” akan memberikan teroetama sekali loekisan jang benar tentang Nippon, daerah kema’moeran bersama di Selatan, dengan Djawa sebagai poesatnja, dan djoega dari lain bagian doenia, Gambar. itoe adalah boekti jang senjata-njatanja, karena ia meloekiskan kebenaran dan tidak dapat berdjoesta.
- 2) „**Djawa Baroe**” adalah alat perantaraan sebaik-baiknja antara bangsa Indonesia dan Nippon. Madjallah ini meroepakan soeatoe lapang pertemoean bangsa jang ada disini.
- 3) „**Djawa Baroe**” djoega bisa dijadikan alat oentoek mentjapai kemenangan dari peperangan hebat sekarang ini. Poen djoega madjallah ini dapat membangkitkan rada persaudaraan antara bangsa Nippon dan Indonesia.
- 4) „**Djawa Baroe**” dipimpin oleh fihak Indonesia dan Nippon bersama-sama oentoek mewoejoedkan pekerdjaan bersama jang rapat antara fihak Indonesia dan fihak Nippon, jaitoe antara staf soerat kabar „**Djawa Shinboen**” dan „**Asia-Raya**”.
- 5) „**Djawa Baroe**” pasti akan madjoe tjepat dan isinja makin lama makin sempoerna. Kepada para pembatja madjallah ini dipersembahkan sebagai kepoenjaanja sendiri. Kita berharap soedi kiranja pembatja sekalian menjampaikan kepada kami segala jang diinginkan dan diharapkan oentoek mendjadikan madjallah ini alat penerangan jang sesempoerna-sembopoernanja.

Demikianlah harapan kami
Hidoephlah „**Djawa Baroe**”⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa majalah *Djawa Baroe* memiliki tujuan untuk dapat dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat. Majalah ini juga dimaksudkan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Jepang yang berada di Jawa. Ilustrasi gambar digunakan sebagai media utama propaganda dalam majalah ini untuk menyampaikan informasi kepada para pembacanya.

Selain itu, majalah ini juga dimanfaatkan sebagai alat pendukung Jepang dalam perang yang sedang mereka hadapi. Majalah *Djawa Baroe* memiliki keunikan pada setiap sampul utama di setiap edisinya, yaitu menampilkan ilustrasi bergambar dan kata-kata yang dirancang untuk menarik perhatian para pembaca

⁸⁰ *Djawa Baroe* No. 1 2603, *Tjita-tjita Djawa Baroe*, 1 Januari 1943, hlm. 1.

serta mengandung unsur propaganda. Seperti pada sampul edisi kedua bulan Januari tahun 1943, menampilkan gambar seorang gadis Jawa yang mengenakan pakaian Jepang.



Gambar 3.1 Gadis Jawa mengenakan pakaian tradisional Jepang
Sumber: *Djawa Baroe* No. 2 2603, 15 Januari 1943.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kemunculan majalah ini tujuannya adalah untuk propaganda. Pemerintah Jepang menggambarkan bahwa orang Indonesia dapat mengenakan pakaian tradisional Jepang yaitu untuk memperkuat rasa solidaritas serta dukungan rakyat Indonesia terhadap Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di kalangan rakyat Indonesia dalam menghadapi pihak sekutu. Selain itu, penggunaan pakaian Jepang juga dimaksudkan sebagai simbol identitas baru yang membedakan masyarakat Indonesia dari bangsa-bangsa lain yang dianggap sebagai musuh.

Majalah *Djawa Baroe* ini terdapat keunikan pada setiap edisi terakhirnya, yaitu edisi ke 24 yang memuat sejarah perjalanan selama satu tahun terakhir masa penerbitannya. Dalam bagian berisi kutipan sejarah satu tahun tersebut, mayoritas

isinya memuat pemberitaan mengenai berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Jepang terhadap bangsa Indonesia, mencakup bidang militer, politik, industri, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya⁸¹.

Majalah ini juga memuat esai dan artikel yang ditulis oleh tokoh-tokoh terkemuka di Indonesia, salah satunya yaitu Maria Ullfah Santoso⁸² yang memuat artikel berjudul *Kewajiban Kaum Wanita dalam Masyarakat Baru*⁸³. Dalam tulisannya tersebut, Maria Ullfah Santoso menekankan bahwa kaum wanita Indonesia yang sejak dulu sudah ingin bersatu dan berpendidikan. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kaum wanita diminta aktif ikut serta untuk membangun masyarakat baru, baik dalam urusan rumah tangga maupun ruang publik, dan juga ikut bergabung dalam organisasi yang dibentuk oleh Jepang yaitu *Poesat Tenaga Rakjat* atau PUTERA.

Hal menarik lainnya dalam majalah ini yaitu menyediakan rubrik khusus yang disesuaikan dengan minat pembacanya. Para pembaca dapat mengajukan kegiatan atau topik yang mereka inginkan untuk ditampilkan di majalah, salah satu contoh rubrik hasil permintaan pembaca adalah mengenai *Ikebana* (seni merangkai bunga Jepang)⁸⁴.

⁸¹ *Djawa Baroe* No. 24 2603, *Sedjarah Djawa Baroe dalam Tahoen* 2603, 15 Desember 1943, hlm. 2.

⁸² Dikenal sebagai perempuan pertama di Indonesia yang bergelar Sarjana Hukum, perempuan Indonesia pertama yang menjadi menteri, seorang tokoh pergerakan perempuan Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia. Lihat: Yuda B Tangkilisan, *Srikandi Pendiri Bangsa: Perjuangan dan Sumbangsih Maria Ulfah untuk Kemerdekaan Indonesia*, Multikultura, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 6. dan Laksmi Hestirani, *Pemikiran Maria Ullfah Santoso tentang Hak Pilih Perempuan Indonesia (1938-1941)*, *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 3.

⁸³ *Djawa Baroe* No. 7 2603, *Kewadjaban Kaoem Wanita dalam Masjarakat Baroe*, 1 April 1943, hlm. 4.

⁸⁴ *Ikebana* 生け花 merupakan seni merangkai bunga yang berasal dari Jepang. Dalam praktiknya, *Ikebana* tidak hanya menggunakan bunga sebagai elemen utamanya, tetapi melibatkan



Gambar 3.2 Ikebana (Seni Merangkai Bunga)
Sumber: *Djawa Baroe* No. 14, 15 Juli 1945.

Majalah *Djawa Baroe* merupakan salah satu majalah yang paling banyak memuat berita disertai dengan ilustrasi bergambar masa pendudukan Jepang di Indonesia. Selain kaya akan ilustrasi, majalah ini juga menyajikan berbagai berita mengenai perkembangan Jepang dalam peperangan, serta karya sastra dari penulis Indonesia dan Jepang yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan propaganda kepada para pembaca. Secara keseluruhan, majalah ini berfungsi sebagai media utama Jepang di Indonesia yang diperkuat oleh isi majalah yang sarat akan dengan unsur-unsur propaganda, baik dalam bentuk berita, gambar, maupun pilihan kata-kata yang digunakan.

ranting, daun, buah, dan juga rumput. Tujuan dari seni ini yaitu untuk menampilkan keindahan alami tumbuhan dalam susunan yang bermakna. Lihat: Lina Rosalina dkk, *Pengenalan Budaya Merangkai Bunga ala Jepang (Ikebana)*, HARMONI: Jurnal Departemen Linguistik FIB UNDIP, Vol. 1, No. 1, November 2017, hlm. 1.